



Judul	: Warga keluhkan pendaftaran BBM bersubsidi via website
Tanggal	: Minggu, 03 Juli 2022
Surat Kabar	: Media Indonesia
Halaman	: 2

Warga Keluhkan Pendaftaran BBM Bersubsidi via Website

Pertamina melakukan uji coba pendaftaran pembelian BBM bersubsidi melalui website pada 1-30 Juli di 11 kota.

BENNY BASTIANDY

benny@medioindonesia.com

BERAGAM keluhan diutarakan warga di berbagai kota ketika hendak mendaftar di website www.subsiditepat.mypertamina untuk menjadi konsumen bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar dan pertalite.

Anza Suseno, warga Kota Sukabumi, sudah berupaya mengeklik website tersebut pada Jumat (1/7). Namun, ia selalu terkendala sistem yang eror.

"Dari semalam susah login. Nanti saya mau mencoba isi BBM dulu menggunakan aplikasi ini supaya tahu caranya," kata Anza, kemarin.

Anggota Komisi VII DPR Paramitha Widya Kusuma terus terang tidak setuju dengan segala sesuatu yang membuat

rakyat ribet untuk memperoleh kebutuhan mereka.

"Dengan aplikasi seperti itu pasti banyak warga tidak paham. Dulu sudah ada program digitalisasi di 5.500 SPBU. Apa hasilnya? Berarti selama ini digitalisasi tidak dijalankan dengan baik," ujar Paramitha.

Ardi Hamdi, sopir angkot di Kota Palembang, mengaku dia dan pengemudi trayek Ampera-Tangga Buntung bingung dengan kebijakan yang bertujuan mengatur agar BBM bersubsidi tidak mengalir kepada warga mampu.

"Kami tidak memakai ponsel canggih. Bagaimana bisa kami isi bensin (pertalite) jika tidak punya ponsel. Jangankan ponsel, untuk membeli kuota internet saja kami tidak sanggup. Penghasilan sehari-hari tidak banyak," keluh Ardi.

Senada dengan Ardi, hal serupa juga dikemukakan

Novish, warga Sukarami, Palembang. "Berarti kalau mau beli BBM, bakal ribet. Iya, kalau ada ponsel dan ada aplikasi. Bagaimana bila tidak punya ponsel? Tentunya membuat ruwet,"

Sales Branch Manager Retail VI Pertamina Bandung Imam Bukhari mengatakan saat ini pihaknya baru memulai sosialisasi untuk pendaftaran konsumen BBM jenis pertalite dan solar. Para pemilik kendaraan wajib mendaftar di website *Mypertamina*.

"Karena negara harus melindungi penerima BBM subsidi. Beban subsidi negara mencapai Rp502 triliun. Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis sudah mengalami kelebihan kuota BBM subsidi," ungkap Imam.

Pemilik kendaraan pribadi ataupun angkutan umum tidak perlu bingung apabila tidak memiliki ponsel. Pertamina sudah mendirikan sembilan posko SPBU di wilayah Jawa Barat (Jabar), termasuk ada

tiga terminal BBM di Kota Tasikmalaya, Ujungberung,

dan Padalarang.

"Setiap SPBU tetap membantu pendaftar karena mereka semua sudah memahami. Namun, pembelian BBM pertalite dan solar masih berjalan normal seperti biasa," lanjut Imam.

11 daerah

Sekretaris Perusahaan PT Pertamina Patra Niaga Irti Ginting juga menegaskan pembelian BBM bersubsidi masih bisa dilakukan seperti biasa.

"Warga tidak perlu khawatir. Ini masih proses pendaftaran dan sosialisasi. Kami buka pendaftaran dan sosialisasi," kata Irti.

Pertamina melakukan uji coba pembelian BBM bersubsidi melalui website pada 1-30 Juli di 11 kota, yakni Kota Bukittinggi, Kabupaten Agam, Kota Padang Panjang, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bandar Lampung, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Manado, Kota Yogyakarta, dan Kota Sukabumi.

Konsumen yang telah mendaftar di website *Mypertamina* akan menerima kode QR dalam waktu tujuh hari kerja setelah diproses Pertamina. Sebelum bisa mengakses kode QR, masyarakat bisa membayar melalui dompet digital (*e-wallet*) dan kartu kredit.

Lebih lanjut, Irti mengatakan ketentuan mengenai kriteria warga yang dapat membeli solar dan pertalite diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

Beleid itu mengatur pembelian BBM solar kepada usaha mikro dengan kriteria mesin perkakas yang motor penggeraknya menggunakan solar untuk keperluan usaha mikro. Pembelian dilakukan dengan verifikasi dan rekomendasi kepada SKPD kabupaten/kota yang membidangi usaha mikro.

Sementara itu, aturan mengenai siapa yang berhak mengakses BBM subsidi jenis pertalite, masih difinalisasi pemerintah. (Mir/YH/JI/DW/AD/X-3)